

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia mengenal dua pembiayaan dalam bank yakni pembiayaan lancar dan pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan Paket kebijakan deregulasi pada bulan Mei tahun 1993. Pembiayaan bermasalah dibagi menjadi tiga bagian yakni pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Lembaga bank sangat khawatir apabila ada pembiayaan macet dikarenakan akan mengganggu kondisi keuangan di bank itu sendiri hingga dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Pembiayaan macet atau dikenal dengan istilah problem loan merupakan pembiayaan yang dalam pelunasannya mengalami kesulitan karena adanya beberapa faktor yang disengaja maupun tidak disengaja.¹

Dikatakan pembiayaan bermasalah bilamana²: *pertama*, kriteria pada pembiayaan lancar, kurang lancar dan diragukan tidak dapat dipenuhi; *kedua*, memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, namun belum terjadi pelunasan pinjaman setelah 21 bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan; *ketiga*, penyerahan berkas kepada pengadilan negeri atau BUPN (Badan Urusan Piutang Negara), atau pengajuan permintaan ganti rugi kepada perusahaan yang asuransi pembiayaan.

Secara rata-rata jumlah harta bank umum dibanyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam pembiayaan yang tersalurkan berkisar 60-70

¹ Siamat Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta, 1993), hlm, 220.

² Siswanto Sutojo, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, 1997), hlm, 331.

persennya.³ Pihak bank harus siap dengan risiko yang akan ditanggung ketika ada kegiatan penyaluran pembiayaan dan bisa saja risiko tersebut dapat mengganggu kelangsungan usaha bank umum. Keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Krisis moneter yang melanda pada tahun 1997-1998 memberikan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan dari kasus pembiayaan bermasalah baik terhadap kelangsungan usaha yang ada di bank, maupun perekonomian bangsa.

Pada terbitan khusus mereka "*Indonesia in Crisis*" bulan juli 1998 dan "*Indonesia from Crisis to Opportunity*", bulan juli 1999, the World Bank menyatakan goyahnya sistem perbankan di Indonesia selama masa orde baru, menjadi salah satu dari lima sebab utama krisis ekonomi moneter yang melanda negara ini. Hal itu sekaligus memporak-porandakan kepercayaan para deposan dalam negeri kepada dunia perbankan Indonesia.⁴

Mengatasi kemelut dunia perbankan dalam negeri, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah badan untuk merestrukturisasi bank-bank bermasalah, disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hingga tahun 1998 BPPN harus memsupervisi dan mengawasi 54 bank umum dalam negeri, yang jumlah pinjaman depositonya mencapai 40% seluruh deposito dunia perbankan Indonesia.

Pembiayaan bagi bank umum selain merupakan sumber penghasilan utama, juga sebagai sumber risiko. Dana operasional bank umum sebagian besar diputar dalam pembiayaan. Bila kegiatan bisnis yang satu ini berhasil, akan

³ Siswanto Sutojo, *Strategi Management Kredit Bank Umum: Konsep, Teknik Dan Kasus*, (Jakarta, 2000), hlm, 1.

⁴ Ibid , hlm, 2.

berhasil pula operasi bisnis perbankan. Sebaliknya, bila mereka terjat dalam banyak pembiayaan bermasalah dan atau macet (baik dalam jumlah debitur maupun nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar.⁵ Simpanan deposito nasabah merupakan sebagian besar sumber dana operasional bagi bank umum. Maka dari itu, nasib uang milik nasabah yang didepositkan di bank ditentukan oleh berhasil tidaknya bank mengelola pembiayaan.

Memberikan pembiayaan adalah pekerjaan mudah, kebanyakan orang dapat melakukannya. Tetapi untuk menarik kembali pembiayaan yang sudah diberikan atau pembiayaan tersebut mengalami masalah, dibutuhkan keahlian, pengalaman, serta waktu dan biaya yang cukup besar. Pembiayaan yang bermasalah dalam jumlah yang besar selain dapat mengganggu aktifitas perekonomian juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas telah banyak penulis tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi dilembaga bank syariah. Penelitian terdahulu dengan judul “Mekanisme penanganan pembiayaan Murabahah (Kasus pada BMT Syariah Pare)” yang ditulis oleh Kina dan judul penelitian “Strategi penanggulangan pembiayaan murabahah bermasalah (Kasus pada BMT Ta’awun Cipulir)” yang ditulis oleh Prasetyo dapat disimpulkan bahwa dari faktor-faktor seperti analisa pembiayaan yang kurang tepat, tidak adanya kejujuran dari nasabah, nasabah tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha bangkrut, dan karakter dari nasabah itu sendiri menimbulkan permasalahan dilembaga keuangan syariah. Strategi yang mereka tawarkan yakni

⁵ Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum: Konsep Dan Teknik*, (Jakarta, 1995), hlm, 1.

mengidentifikasi karakter nasabah, melakukan pendekatan pada nasabah, penagihan secara intensif, dan memberikan solusi untuk usaha nasabah. Sedangkan penelitian yang berjudul “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta” oleh Inayah, “Tinjauan Yuridis terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dalam perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah (Studi pada BRI Syariah KCI S.Parman Medan)” oleh Fachri, dan judul penelitian “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara” oleh Yudistira dapat disimpulkan dari penelitiannya yakni *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Liquidasi, dan Write off*.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (studi pada warung mikro PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan)** agar dapat mengenali tanda-tanda pembiayaan yang bermasalah di dalam perbankan khususnya Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan, dan antisipasi serta usaha-usaha yang dilakukan dengan tetap mengacu pada kebijakan yang ada untuk segera menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia perbankan.

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan gambaran kepada lembaga perbankan sehingga diharapkan nantinya ada antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah dengan tetap menggunakan kebijakan yang ada.

2. Manfaat Praktisi

1. Harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.
2. Dapat menjadi sumber rujukan bagi praktisi untuk melengkapi kebijakan dalam hukum perbankan kedepannya, khususnya terkait penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menjadi rujukan atau referensi serta guna menjadi wawasan bagi mahasiswa atau mahasiswi program studi ekonomi syariah maupun jurusan lain yang bersangkutan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi. Peneliti menetapkan batasan-batasan yakni:

1. Pada produk pembiayaan di warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan.
3. Penyelesaian yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan terhadap pembiayaan bermasalah.

